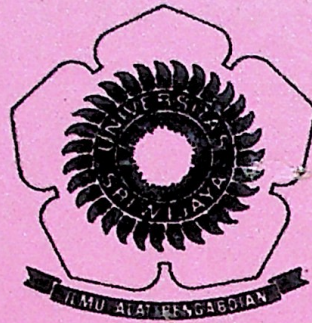


2011

KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH DESA KERINJING
DAN DESA SUKARAJA BARU DI KABUPATEN OGAN ILIR

(Studi kasus Konflik Tapal Batas antara Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja
dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir)



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Mencapai Derajat S1 Ilmu Sosiologi

DISUSUN OLEH :

M. DONI MUNDARTA

07053102076

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2011

S
303-07
DON
K
C. 110095
2011



**KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH DESA KERINJING
DAN DESA SUKARAJA BARU DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**(Studi kasus Konflik Tapal Batas antara Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja
dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Mencapai Derajat S1 Ilmu Sosiologi**

DISUSUN OLEH :

M. DONI MUNDARTA

07053102076

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2011

LEMBAR PENGESAHAN

**KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH DESA KERINJING
DAN DESA SUKARAJA BARU DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**(Studi kasus Konflik Tapal Batas antara Desa Kerinjing
Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan
Kabupaten Ogan Ilir)**

SKRIPSI

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif Dalam Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1 Sosiologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

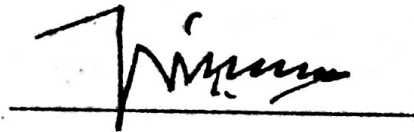
OLEH :

**M. DONI MUNDARTA
07053102076**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Zulfikri Suleman, MA

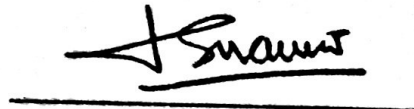
NIP. 195907201985031002



DOSEN PEMBIMBING II

Dra. Yusnaini, M. Si

NIP. 196405151993022001



**KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH DESA KERINJING
DAN DESA SUKARAJA BARU DI KABUPATEN OGAN ILIR**
(Studi kasus Konflik Tapal Batas antara Desa Kerinjing
Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan
Kabupaten Ogan Ilir)

SKRIPSI

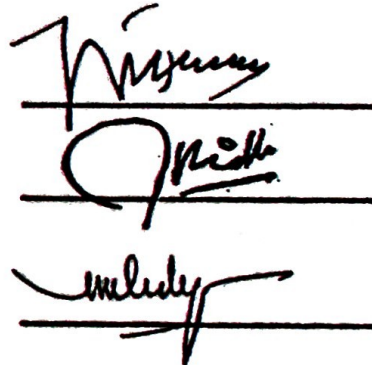
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
dari Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Tanggal, 26 Januari 2011

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dr. Zulfikri Suleman, MA
Ketua

Dr. Ridha Taqwa
Anggota

Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si
Anggota



Indralaya, 9 Februari 2011
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dekan,



Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
Nip. 196010021992032001

MOTTO :

“ Doa restu orang tua

Giat Berusaha

Dan atas izin Allah

Keberhasilan akan kita raih ”

Kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang tuaku tercinta dan terkasih atas dukungan dan do'a yang tanpa henti kepadaku.**
- 2. Saudara-saudaraku Yuk Dina dan Dek Dita yang ku sayangi.**
- 3. Teman-teman dan sahabat-sahabatku tersayang.**
- 4. Dosen FISIP Unsri Jurusan Sosiologi, terima kasih atas semua bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepadaku.**
- 5. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang tak terhingga atas semua bantuan dan dukungannya.**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Konflik Tapal Batas Wilayah Desa Kerinjing dan Desa Sukaraja Baru Di Kabupaten Ogan Ilir “. Penelitian ini mengkaji mengenai konflik horizontal yang terjadi di masyarakat yakni konflik tapal batas wilayah desa antara Desa Kerinjing dan Desa Sukaraja Baru. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan data deskriptif dari fenomena yang dikaji dengan unit analisis yakni kelompok, meliputi kelompok masyarakat kedua desa yang berkonflik dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang penyebab dan dampak yang diakibatkan dari terjadinya dampak tapal batas kedua desa. Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling* dan disesuaikan dengan kebutuhan data. Informan dalam penelitian ini berjumlah 22 orang, yang terdiri dari 11 orang berasal dari Desa Kerinjing dan 11 orang dari Desa Sukaraja Baru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beberapa hal dan isu-isu yang menyebabkan terjadinya konflik tapal batas yakni, faktor sejarah, perbedaan persepsi mengenai tapal batas desa, ekonomi dan adanya kecemburuan sosial menyebabkan konflik tapal batas kedua desa ini menjadi konflik yang berkepanjangan dan belum terselesaikan. Dari beberapa hal dan isu-isu yang menjadi sebab terjadinya konflik tapal batas menyebabkan terjadinya berbagai dampak pada masyarakat kedua desa, baik dampak nyata maupun dampak semu yakni, tidak adanya tugu sebagai tanda batas desa, adanya warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda, jarak sosial, chauvinisme, dampak ekonomi dan adanya masalah komunikasi antara dua desa yang berkonflik sehingga. Secara tidak langsung konflik tapal batas ini telah menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berkonflik.

Kata kunci: Konflik, tapal batas, desa

KATA PENGANTAR

Skripsi yang berjudul “Konflik Tapal Batas Wilayah Desa Kerinjing dan Desa Sukaraja Baru Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Konflik Tapal Batas antara Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir)” secara spesifik mengkaji masalah konflik tapal batas desa adalah melihat bagaimana konflik itu telah berlangsung lama dikarenakan oleh berbagai sebab dan menimbulkan dampak pada masyarakat.

Tak dapat dipungkiri bahwa selesainya naskah skripsi ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih baik moril maupun materiil kepada penulis, untuk itu penulis memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT dan Rasul-Nya atas limpahan dan curahan nikmat serta kasih sayang, kekuatan dan perlindunganNya kepada penulis, dan untuk itu pula secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing I yang telah banyak bersedia meluangkan waktu, tenaga, maupun mencurahkan pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, saran dan arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Yusnaini, M.Si. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan saya banyak masukan, bimbingan, serta arahan yang sangat berguna bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ridha Taqwa dan Ibu Dra. Hj. Eva Lidya, M.si selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan-masukan bagi sempurnanya skripsi ini.
5. Ibu Yunindyawati, S.Sos, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu tidak hanya dalam hal akademik melainkan juga dalam memberikan banyak masukan dan nasihat-nasihat diluar kegiatan akademik yang sangat berguna bagi saya.
6. Seluruh Dosen FISIP Unsri yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang tak ternilai harganya kepada saya.

7. Penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, Ayah Achmad Chairani (alm) dan Ibu Setiawati yang telah banyak berkorban baik moril maupun materil dan juga doa maupun dukungannya selama ini. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kepada kalian Amin.
8. Saudara-saudaraku Rahmadina Setiarani (yuk dina) dan Prindita Setiaranti (dek dita) terima kasih untuk semua dukungannya dan perhatian kalian selama ini.
9. Guru-guru SDN 417 Palembang, SMPN 10 Palembang dan MAN 2 Palembang, terima kasih untuk semua ilmu yang telah kalian berikan hingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini.
10. Sahabat-sahabatku di EHE Fams. Terima kasih untuk semua dukungannya selama ini, kalian sahabat terbaikku.
11. Seluruh teman-teman sosiologi angkatan 2005 terima kasih banyak untuk kebersamaan kita selama ini.
12. Teman-teman KKN-71 posko Desa Skonjing dan Desa Kerinjing terima kasih banyak, dengan kalian saya mendapat pengalaman baru.
13. Adik-adik tingkatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semua bantuan dan dukungannya, semoga amal ibadah kalian dibalas oleh Allah SWT Amin.
14. Kepala Desa Kerinjing beserta Keluarga yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengumpulan data skripsi ini terima kasih banyak saya ucapkan, semoga Anda Sekeluarga diberikan nikmat dan rezeki yang berlimpah dari Allah SWT Amin.
15. Kepala Desa Sukaraja Baru dan Perangkat Desa terima kasih banyak atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian di desa Anda, semoga Allah membalas semua amal kebaikan anda dengan limpahan karunianya Amin.
16. Seluruh masyarakat Desa Kerinjing dan Desa Sukaraja Baru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai, terima kasih banyak saya ucapkan.

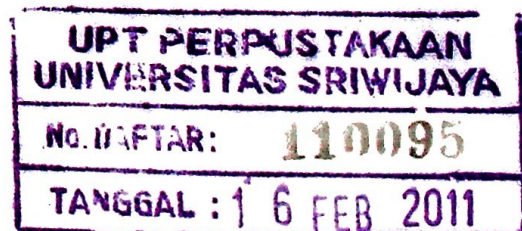
Akhirnya penulis berharap kiranya apa yang telah dicapai ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya sosiologi. Penulis menyadari banyak keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menyambut baik atas berbagai masukan dan saran sebagai perbaikan terhadap skripsi ini.

Inderalaya, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.4. Tinjauan Pustaka	10
1.4.1. Penelitian – penelitian yang relevan dengan penelitian ini	12
1.5. Kerangka Pemikiran	19
1.5.1. Konflik Kelompok di Indonesia	19
1.5.2. Pemetaan Konflik	27
1.5.3. Jenis – jenis dan Tipe Konflik	29
1.5.4. Tanah Sebagai Sumber Produksi	31
1.5.5. Konflik Dialektik Dahrendorf	32
1.5.6. Dampak Terjadinya Konflik Tapal Batas	35



1.6. Metode Penelitian	39
1.6.1. Sifat dan Jenis Penelitian	39
1.6.2. Definisi Konsep	40
1.6.3. Unit Analisis	40
1.6.4. Informan	41
1.6.5. Lokasi Penelitian	42
1.6.6. Data dan Sumber Data	42
1.6.7. Teknik Pengumpulan Data	44
1.6.8. Teknik Analisis Data	46

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 48

2.1. Keadaan Umum Wilayah Penelitian Desa Kerinjing	48
2.2. Keadaan Demografi	49
a. Pemanfaatan Lahan	49
b. Keadaan Penduduk	50
c. Mata Pencaharian	51
d. Tingkat Pendidikan	52
e. Sarana dan Prasarana	53
f. Agama dan Kepercayaan	53
g. Keadaan Sosial Masyarakat	53
2.3. Keadaan Umum Wilayah Penelitian Desa Sukaraja Baru	54
2.4. Keadaan Demografi	55
a. Pemanfaatan Lahan	55
b. Keadaan Penduduk	56
c. Mata Pencaharian	57
d. Tingkat Pendidikan	58
e. Sarana dan Prasarana	59

f. Agama dan Kepercayaan	59
g. Keadaan Sosial Masyarakat	60
2.5. Profil Informan	60

BAB III KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH DESA KERINJING KECAMATAN TANJUNG RAJA DAN DESA SUKARAJA BARU KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR 62

3.1. Penyebab Terjadinya Konflik Tapal Batas	62
3.1.1. Faktor Historis	62
3.1.2. Perbedaan Persepsi Batas Wilayah	71
3.1.3. Faktor Ekonomi	76
3.1.4. Kecemburuan Sosial	80
3.2. Dampak Konflik Tapal Batas Wilayah	83
3.2.1. Dampak Nyata	84
3.2.2. Dampak Semu	89
3.2.2.1. Jarak Sosial	89
3.2.2.2. Chauvinisme	92
3.2.2.3. Ekonomi	96
3.2.2.4. Masalah Komunikasi	99

BAB IV PENUTUP 103

4.1. Kesimpulan	103
4.2. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1.	Pemanfaatan Lahan	50
2.1.	Jumlah Penduduk Desa Kerinjing Berdasarkan jenis kelamin	50
2.3.	Jumlah Penduduk Desa Kerinjing Berdasarkan umur	51
2.4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	51
2.5.	Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	52
2.6.	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	56
2.7.	Jumlah Penduduk Desa Sukaraja Baru Berdasarkan Jenis Kelamin	56
2.8.	Jumlah Penduduk Desa Sukaraja Baru Berdasarkan umur	57
2.9.	Komposisi Penduduk Berdasar Mata Pencaharian	58
2.10.	Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	59
2.11.	Keadaan Informan Desa Kerinjing	60
2.12.	Keadaan Informan Desa Sukaraja Baru	61

DAFTAR BAGAN

1.1.	Konflik Tapal Batas Wilayah Desa Kerinjing dan Desa Sukaraja Baru ...	38
4.1.	Segitiga Konflik Galtung	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Sketsa Gambar Konflik Tapal Batas Desa Keringjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir	74
-------------------	--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sejak reformasi, dengan ditandai tumbangnya rejim kekuasaan Soeharto yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, ketegasan batas daerah menjadi penting. Batas daerah yang tidak jelas mengakibatkan berbagai sengketa, soal tapal batas memang menjadi isu yang sangat penting sejak reformasi di Indonesia. Reformasi menyebabkan struktur dan kultur pemerintahan kita berubah secara signifikan. Struktur yang tadinya sangat sentralistik dan berjenjang berubah menjadi struktur desentralisasi dan otonom. Pusat memiliki kewenangan yang relatif terbatas dan hubungan hierarkhi tidak lagi terjadi sebagaimana yang dipraktekkan selama ini sebelum reformasi.

Pada masa sebelum reformasi (Orde Baru) kita tidak menemukan sengketa tapal batas yang serius. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Penyebab pertama karena memang segala urusan yang ada di daerah itu lebih bersifat menunggu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dan penyebab kedua disebabkan karena kebijakan pemerintah sebelum reformasi yang berlandaskan pada prinsip keamanan politik, dimana konflik lokal dipandang sebagai tindakan

subversif¹ dan ancaman terhadap integrasi nasional, sehingga konflik tapal batas yang terjadi sering terabaikan atau “ditiadakan” demi keamanan negara. Orde baru mendefinisikan konflik secara sempit dan negatif, konflik selalu dikaitkan dengan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan.²

Di masa Orde Baru, walaupun terjadi sengketa tapal batas, pola pemerintahan waktu itu memungkinkan persoalannya mudah diselesaikan. Seorang Camat dengan mudah memerintahkan kepala desanya, Bupati tidak sulit menginstruksikan para Camatnya. Gubernur juga bisa “main tunjuk” saja kepada Bupati atau Walikota, sehingga soal tapal batas yang bermasalah selesai dengan “main tunjuk” dan “main perintah” dari pejabat atasan. Pola yang terjadi seperti pada masa sebelum reformasi itu kini tak lagi mudah terjadi, itu sebabnya dimasa sekarang (tahun 2010) ini soal tapal batas menjadi penting.

Salah satu konflik horizontal (konflik tapal batas) yang sering terjadi pada masyarakat dewasa ini yaitu tentang konflik tapal batas wilayah atau konflik perebutan batas wilayah. Konflik tapal batas ini bisa terjadi biasanya dikarenakan masing – masing pihak mengklaim bahwa batas wilayah yang mereka yakini ialah tapal batas wilayah yang benar dan memiliki bukti yang kuat, padahal hal tersebut belum tentu benar bila masing – masing kelompok yang saling klaim tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setiap kelompok dalam masyarakat terjebak pada kebenaran subjektif kelompok atau golongannya masing

¹ usaha terorganisasi yang bertujuan menumbangkan pemerintah yang sah melalui kekerasan atau bertujuan mengganti pemerintah itu dengan cara-cara yang ditandai oleh penggelapan, kebohongan, dan gangguan keamanan.

(<http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=tindakan%20subversif>)

² Sosiologi Konflik & Isu – Isu Konflik Kontemporer, Novri Susan, M.A, hal 2-3

– masing. Adanya perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan terjadinya konflik pada masyarakat, dan tidak jarang akibat dari konflik tersebut berujung pada tindak kekerasan yang pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak yang bertikai.

Banyak contoh kasus dari konflik tapal batas wilayah, mulai dari skala internasional maupun nasional dan lokal. Seperti konflik antara Negara Israel-Palestina yang berkepanjangan, Indonesia-Malaysia yang memperebutkan Blok Ambalat, India-Pakistan yang memperebutkan dataran tinggi Kashmir, di tingkat nasional ada konflik tapal batas antara Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumsel³, di tingkat lokal konflik perbatasan antara Kabupaten Ogan Ilir-Muara Enim di Sumsel, maupun antara Kabupaten Musi Rawas-Musi Banyu Asin yang memperebutkan batas wilayah karena adanya sumber daya alam yang cukup besar di daerah yang diperebutkan sehingga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah kabupaten masing - masing.

Konflik tapal batas wilayah atau perebutan batas wilayah juga terjadi di daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, tepatnya antara Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan. Tidak diketahui pasti sejak kapan konflik tapal batas antara dua wilayah tersebut terjadi dan apa sebabnya. Akan tetapi, walaupun sedang terjadi konflik antara dua desa tersebut, keadaan dilapangan tidak menunjukkan adanya konflik diantara dua desa tersebut seperti halnya konflik yang terjadi di wilayah lain. Warga

³ <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/06/06/19741/Konflik-Tapal-Batas-Jambi-Sumsel-Belum-Tuntas>

masyarakat dari kedua desa tetap menjalankan aktifitas mereka seperti biasanya dan bahkan anak – anak dari Desa Kerinjing banyak yang bersekolah di sekolah yang berada di wilayah Desa Sukaraja Baru, dengan kata lain konflik yang terjadi antara kedua desa tersebut merupakan konflik laten atau konflik terpendam.

Konflik tapal batas kedua desa tersebut berbeda dengan konflik tapal batas yang sering terjadi, seperti konflik tapal batas antara Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kabupaten Musi Rawas yang memperebutkan batas wilayah karena di wilayah yang mereka perebutkan itu terdapat sumber daya alam yang cukup besar sehingga bisa menambah PAD (pendapatan asli daerah) kedua kabupaten ini atau seperti konflik lahan antara warga dan pihak perusahaan beberapa waktu lalu yang berujung pada konflik terbuka dan mengakibatkan korban dari kedua belah pihak.

Konflik tapal batas Desa Kerinjing dan Desa Sukaraja Baru juga belum diketahui apakah seperti konflik yang terjadi antara Negara Indonesia dan Malaysia yang memperebutkan Blok Ambalat, karena di Blok tersebut terdapat sumber daya alam yang sangat besar, sehingga cukup berpengaruh terhadap pendapatan Negara dan juga kedaulatan Negara, akibat dari konflik tersebut berdampak pada sempat renggangnya hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia dan juga munculnya reaksi negatif dari beberapa masyarakat Indonesia yakni munculnya sikap anti Malaysia yang dilakukan dengan cara demonstrasi dan aksi “sweeping” dari beberapa organisasi masyarakat terhadap warga negara Malaysia di Indonesia.

Konflik tapal batas antara Desa Kerinjing dan Desa Sukaraja Baru juga belum diketahui apakah juga memiliki ciri dan dampak yang sama seperti konflik yang terjadi antara Negara Palestina-Israel, dimana konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut adalah konflik terbuka yang disebabkan oleh pembangunan permukiman – permukiman baru Negara Israel di wilayah Palestina sehingga warga Palestina menjadi tersisih dari wilayah mereka sendiri dan menyebabkan mereka berontak dan melakukan perlawanan baik dengan cara – cara diplomatik maupun dengan cara – cara kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak. Warga Palestina menuntut agar Negara Israel menghentikan pembangunan permukiman baru karena dianggap pembangunan permukiman baru tersebut telah mengambil wilayah dan tanah mereka sehingga berdampak pada berkurangnya lahan untuk produksi mereka.

Konflik tapal batas antara kedua desa tersebut tidak seperti konflik di atas, karena belum diketahui apa penyebab pastinya dan belum sampai menyebabkan konflik terbuka yang dapat menyebabkan korban dari kedua desa.

Salah seorang perangkat Desa Sukaraja Baru mengatakan :

“Konflik tapal batas wilayah yang terjadi antara Desa Sukaraja Baru dan Desa Kerinjing telah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum Kabupaten Ogan Ilir belum menjadi daerah otonom dan memisahkan diri dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.”

Begitu juga menurut pernyataan Kepala Desa Kerinjing, ia mengatakan :

“ Konflik tapal batas ini sudah berlangsung cukup lama, sebelum Kabupaten Ogan Ilir menjadi kabupaten sendiri dan penyelesaiannya tak kunjung selesai sampai sekarang. Akan tetapi, belum terjadi konflik terbuka yang mengakibatkan korban jiwa dari dulu sampai sekarang. “

Walaupun begitu, konflik baru terasa apabila salah satu desa ada yang membangun tugu batas desa yang membatasi kedua desa tersebut, hal tersebut bisa dilihat dari tugu batas desa berupa bangunan dari semen dan batu bata ataupun hanya berupa kayu dan seng yang diberi nama yang dibangun oleh salah satu desa baik itu Desa Kerinjing ataupun Desa Sukaraja Baru akan segera hancur dan tinggal puing – puing bangunannya saja. Cara – cara untuk menghancurkan tugu batas desa tersebut biasanya dilakukan secara diam – diam, bukan secara terang –terangan atau secara langsung. Waktu yang diambil untuk menghancurkan atau merobohkan tugu batas desa tersebut biasanya pada waktu malam hari, karena pada waktu tersebut dirasa cukup aman sehingga tidak akan menyebabkan konflik terbuka.

Salah seorang perangkat Desa Sukaraja Baru mengatakan :

“ Mengenai tentang pengrusakan tugu tapal batas wilayah yang dibangun oleh Desa tetangga (Desa Kerinjing), itu bisa terjadi karena tidak adanya komunikasi yang dilakukan oleh Desa tetangga. Sebelum adanya kejelasan mengenai tapal batas wilayah kedua desa, kami harapkan Desa tetangga jangan membangun tugu apapun untuk menghindari terjadinya konflik.”

Sedangkan, salah seorang perangkat Desa Kerinjing mengatakan :

“ Mengenai pembangunan tugu batas desa yang dibangun oleh desanya (Desa Kerinjing) itu sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bupati Ogan Ilir yakni batas lama yang dulu sudah diyakini oleh kedua desa. Yaitu tempat yang dulunya terdapat pohon Keranji, sehingga tidak seharusnya Desa Sukaraja Baru merusak ataupun menghancurkan tugu batas tersebut.”

Akan tetapi pohon Keranji yang menjadi patokan batas desa kini sudah tidak ada lagi, sehingga sulit untuk menentukan dimana lokasi sebenarnya dari batas kedua desa tersebut, dan juga apa yang dikatakan oleh Bupati Ogan Ilir hanya sebatas perkataan lisan saja tanpa adanya kekuatan hukum tetap, sehingga memungkinkan masih bisa untuk dilanggar dan menjadikan konflik baru akibat tidak adanya kekuatan hukum tetap yang dapat mengikat.

Masyarakat dari kedua desa sebenarnya tidak puas dengan keadaan ini, karena akibat dari tidak adanya kejelasan batas desa tersebut menyebabkan ada beberapa rumah penduduk yang sebenarnya masuk wilayah Desa Sukaraja Baru memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa Kerinjing dan juga sebaliknya, ada beberapa rumah penduduk yang masuk wilayah Desa Kerinjing memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa Sukaraja Baru karena luasnya tanah yang disengketakan oleh kedua desa yakni $\pm 1,4 \text{ km}^2$.

1. 2. Rumusan Masalah

Konflik kelompok atau masyarakat yang memperebutkan tapal batas wilayah semakin sering terjadi akhir – akhir ini, seperti konflik perebutan tapal batas wilayah antara Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir. Kedua desa telah lama memperebutkan tapal batas wilayah desa, namun belum diketahui penyebab dari konflik tersebut dan juga belum diketahui apa dampak dari konflik perebutan tapal batas wilayah pada masyarakat di kedua desa yang berkonflik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah :

1. Mengapa terjadi konflik tapal batas wilayah Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir?
2. Apa dampak dari terjadinya konflik tapal batas wilayah antara Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya konflik tapal batas wilayah Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui dampak dari terjadinya konflik tapal batas wilayah antara Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif atau tambahan informasi bagi masyarakat umum ataupun pihak-pihak terkait dengan masalah konflik tapal batas wilayah, khususnya kepada Ilmu Sosiologi. Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan kepada pihak yang berwenang terkait banyaknya konflik tapal batas yang terjadi di masyarakat akhir – akhir ini.

1.4. Tinjauan Pustaka

Pada isi UUD 1945 pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang – undang.” Oleh karenanya Pemerintahan desa saat ini diatur dalam perundang – undangan tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang – Undang No. 32 tahun 2004.

Menurut ketentuan Undang – Undang tersebut, Desa diberi pengertian sebagai :

“ Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴

Berdasarkan Undang – Undang tersebut, jelas bahwa dengan tidak adanya batas – batas wilayah yang jelas, kedua desa tersebut telah menyalahi aturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah cepat tanggap dalam menyelesaikan konflik tersebut. Lambannya pemerintah dalam menyelesaikan konflik horizontal antara dua desa tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan meluas, sehingga akan dimanfaatkan oleh pihak – pihak tertentu yang mengambil

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

kesempatan dari adanya konflik kedua desa tersebut, dengan kata lain akan terjadi konflik terbuka antara kedua desa yang diakibatkan oleh kepentingan pihak lain.

Konflik antar kelompok juga sangat ditentukan oleh bangunan nilai dan penggunaan simbol yang berbeda antar kelompok tersebut sehingga menimbulkan penafsiran dan “rasa” (pendapat) yang berbeda untuk dihargai atau menghargai yang dalam hal ini seperti halnya konflik horizontal antara Desa Kerinjing dan Desa Sukaraja Baru yang masing – masing desa memiliki penafsiran “rasa” (pendapat) yang berbeda mengenai batas desa mereka.

Menurut pandangan Talcott Parsons, dalam setiap masyarakat harus dipandang secara integratif, dan perilaku sosial suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh nilai dan kebudayaannya. Nilai – nilai kebudayaan dan pola – pola lain dapat menjiwai kepribadian, sehingga mempengaruhi struktur kebutuhan yang selanjutnya menentukan kehendak seseorang atau kelompok menentukan peranan sosialnya.⁵

Konflik tapal batas merupakan salah satu bentuk dari konflik horizontal yang terjadi di masyarakat, seperti halnya konflik pribumi dengan nonpribumi, konflik penduduk asli dengan pendatang yang terjadi di Sambas Kalimantan Barat, maupun konflik yang berbau agama seperti konflik Islam dengan Kristen yang terjadi di Ambon. Konflik pada dasarnya merupakan suatu dari berbagai bentuk perwujudan masalah sosial yang dialami oleh individu atau kelompok yang lainnya. Masalah sosial pada dasarnya adalah suatu kenyataan sosial yang

⁵ Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia Studi kasus: Kupang, Mataram, dan Sambas*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001, hal. 10.

Ada beberapa contoh kasus konflik horizontal yang membahas tentang konflik tapal batas. Seperti contoh kasus yang terjadi antara Kabupaten Musi Banyu Asin dan Musi Rawas yang memperebutkan sumur penghasil gas Suban 4 yang dikelola oleh perusahaan Conocco Philips. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin meminta agar hasil dari Suban 4 dibagi dua saja antara MUBA dan MURA sebagai win-win solution. Sepintas, sebagian tentu menilai hal ini sebagai cara penyelesaian terbaik. Tetapi mungkin sulit diterima bagi MURA yang secara hukum itu merupakan haknya. Hak itu telah secara tegas dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4.⁶

Dalam Pasal 1 Permendagri tersebut secara tegas menyatakan: “Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil sumber daya alam sektor gas bumi dari sumur Suban 4 yang berlokasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas.” Permendagri ini dibuat berdasarkan penelitian mendalam oleh tim gabungan terdiri dari Ditjen BAKD dan Ditjen PUM Depdagri, Ditjen Migas, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.⁷

Pada contoh kasus konflik tapal batas yang terjadi antara Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kabupaten Musi Rawas, penyelesaian konflik yang ditengahi oleh pihak ketiga yakni Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, tidak mendapat respon yang positif dari Kabupaten Mura yang menganggap keputusan tersebut tidak tepat karena seharusnya merekalah yang harus mengelola Suban 4 tersebut sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 2007 tentang

⁶ *Sumatera Ekspres* edisi: 28 /1 /2010.

⁷ *ibid*

produktif yang ada dalam suatu masyarakat yang tidak dapat ditanggapi atau dipahami dengan menggunakan pengetahuan masyarakat bersangkutan (Rudito dan Famiola, 2008 : 211).

Konflik dapat menjadi masalah yang serius apabila tidak ditanggapi dengan serius pula, konflik dapat menghancurkan kedua kelompok secara langsung ataupun tidak langsung dan dapat menurunkan hubungan anggota dalam kelompok yang bersangkutan apabila konflik tersebut dibiarkan berlarut – larut tanpa adanya penyelesaian. Berhasil atau tidaknya konflik yang dihadapi pada dasarnya sangat bergantung pada seberapa besar perhatian pihak – pihak yang terlibat dalam mempertimbangkan sumber atau penyebab konflik itu sendiri. Dengan mempertimbangkan sumber konflik, maka strategi yang akan diambil dapat dilaksanakan. Hal ini bisa terjadi karena masing – masing sumber konflik memberikan strategi yang berbeda dalam penyelesaiannya.

1.4.1. Penelitian – penelitian yang relevan dengan penelitian ini

Belum banyak penelitian yang membahas tentang konflik tapal batas wilayah, khususnya konflik tapal batas di wilayah Sumatera Selatan. Namun dalam penelitian ini peneliti akan melengkapi data dari beberapa contoh kasus konflik tapal batas wilayah ataupun konflik horizontal yang diambil dari berbagai tulisan baik berupa artikel - artikel, buku – buku, internet, maupun dari media massa.

Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4.

Seperti halnya konflik tapal batas Kabupaten Muba dan Kabupaten Mura, konflik tapal batas di Kabupaten Bangka sedikit berbeda, karena konflik tapal batas yang terjadi di Kabupaten Bangka antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Cit Kecamatan Riausilip disebabkan adanya keluhan warga Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang merasa dirugikan karena sebagian lahan milik warga diduga diserobot perusahaan perkebunan sawit, PT PAL.⁸

Kepala BPM dan Pemdes Kabupaten Bangka, Muzami melalui Kabid Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, Meidi mengatakan persoalan tapal batas antar Desa Bukit Layang dengan Cit masih dalam proses penyelesaian. “Permasalahan tapal batas wilayah termasuk batas desa sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 tahun 2006 tentang Penetapan Batas Desa,” kata Meidi⁹

Konflik tapal batas desa yang terjadi di Kabupaten Bangka antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Cit Kecamatan Riausilip hampir memiliki kesamaan dengan konflik tapal batas antara Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Kecamatan Indralaya Selatan, hanya saja yang menjadi salah satu sumber konflik tapal batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Cit Kecamatan Riausilip telah diketahui, yakni adanya dugaan penyerobotan lahan oleh perusahaan perkebunan sawit, PT. PAL.

⁸ *Bangka Pos* edisi: 10/Oct/2009

⁹ *ibid*

Seperti halnya konflik tapal batas desa yang terjadi di Kabupaten Bangka antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Cit Kecamatan Riausilip yang melibatkan perusahaan, konflik tapal batas antara Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyu Asin dengan Desa Muara Lematang Kabupaten Muara Enim juga melibatkan perusahaan.¹⁰ Tanah konflik yang menjadi sengketa antara kedua desa telah ditanami sawit oleh PT. RGB. Lahan darat yang secara hak ulayat¹¹ atau menurut pelaku sejarah diklaim warga Rantau Bayur, akan tetapi perkebunan tersebut milik Muara Enim.

Sementara itu persoalan konflik tapal batas juga terjadi di Provinsi NTT antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai (juga calon Kabupaten Manggarai Timur). Pada konflik tapal batas antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai sempat terjadi aksi 'panas' di wilayah tapal batas itu. Puluhan anggota Suku Baar di Desa Sambinasi Kecamatan Riung memblokir jalan trans utara Flores, tepatnya antara Riung-Pota dan beberapa minggu kemudian, situasi panas itu terjadi lagi. Sebuah kapela di Riominsi terbakar dan hingga kini pelaku pembakaran tersebut belum diketahui.¹²

Selama masalah di perbatasan belum diselesaikan, Gubernur NTT minta semua aktivitas di perbatasan dihentikan untuk mengurangi terjadinya konflik.

¹⁰ *Sumatera Ekspres* edisi : 23/Feb/2010

¹¹ **Hak ulayat** adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan tersebut.

¹² <http://isidoruslilijawa.blogspot.com/2008/04/situasi-batas-di-tapal-batas.html>

Pertemuan dua pucuk pimpinan daerah yang difasilitasi Depdagri menyepakati selama kurun waktu kasus akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun sejak pengesahan Manggarai Timur menjadi kabupaten otonom. Penyelesaian akan mengacu pada dokumen yang ada yakni mengacu pada dokumen dan peta sejarah yang dibuat tahun 1916 dan 1918. Selain itu dalam dokumen juga terungkap kesepakatan bersama antara Bupati Yan Yos Botha dan Bupati Frans Sales Lega. Dokumen kesepakatan 1973 telah dikukuhkan melalui keputusan Gubernur NTT tanggal 22 Januari 1973 yang ditindak lanjuti dengan penanaman pilar.¹³

Yang menjadi akar permasalahan dalam contoh kasus tersebut ialah bahwa batas calon Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada telah mengambil kurang lebih 40-an Km wilayah Ngada ke arah timur atau ratusan kilometer dari utara ke selatan. Titik-titik batas yang disebutkan dalam dokumen pemekaran Manggarai Timur itu pun bertentangan dengan Keputusan Gubernur NTT Nomor 22 tahun 1973 tentang Kesepakatan Batas Wilayah antara Kabupaten Ngada dan Manggarai.¹⁴

Sementara itu, beberapa contoh konflik horizontal lainnya yang ditulis oleh **Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim** dalam bukunya yang berjudul “Kerusuhan Sosial di Indonesia Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas” menjelaskan dengan rinci beberapa faktor penyebab dan faktor yang mempercepat terjadinya konflik di daerah konflik yang mereka teliti. Pada kasus kerusuhan Kupang /NTT, penulis menggambarkan kerusuhan yang terjadi di Kupang pada

¹³ <http://isidoruslilijawa.blogspot.com/2008/04/situasi-batas-di-tapal-batas.html>

¹⁴ *ibid*

30 November 1998. Kerusuhan Kupang, merupakan suatu kerusuhan yang dilatarbelakangi oleh masalah pergeseran ekonomi dari penduduk lokal ke penduduk pendatang. Agama dan politik dalam kerusuhan ini, hanya dijadikan sebagai alat untuk mempercepat dan memperluas skala dan wilayah kerusuhan.

Di sisi lain, faktor yang mempercepat terjadinya konflik yakni sejarah sosial NTT maupun Kupang sangat sarat dengan konflik dan persaingan yang berbungkus etnis, suku, agama, dan golongan. Masalah lain yang turut mempercepat terjadinya konflik adalah terbukanya konflik SARA di tingkat nasional, seperti kasus kerusuhan di Ketapang, maupun ditempat lainnya. Masalah sosial, kriminalitas, pengangguran, maupun persoalan keamanan turut pula mempengaruhi terjadinya kerusuhan.

Pada kasus kerusuhan Mataram/NTB, penulis menganalisis faktor – faktor (politik, ekonomi, sosial-budaya) yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan di Mataram dan sekitarnya yang terjadi pada 17-19 Januari 2000, atau yang dikenal pula sebagai Peristiwa 171. Kasus Mataram menjadi menarik lantaran wilayah ini sebelumnya diperkirakan akan steril dari ulah para provokator. Ternyata, daerah yang dikenal sebagai “Pulau Seribu Mesjid” ini pun turut pula mengalami konflik seperti daerah lainnya.

Pada kasus kasus kerusuhan Sambas/Kalimantan Barat, penulis mengkaji berbagai persoalan yang mendasari berbagai persoalan yang mendasari terjadinya kerusuhan antar etnik di Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten Sambas pada khususnya baik dari akar masalah, akselerator (yang mempercepat konflik),

maupun faktor pemicu terjadinya konflik. Akar masalah dalam kajian ini melihat sejauh mana interaksi sosial antar etnik di wilayah ini terjadi dan bagaimana hasil interaksi sosial ini membentuk stereotip kelompok antara satu etnik dan etnik lainnya. Sementara itu, faktor yang mempercepat konflik dalam kajian ini dilihat dari sejauh mana dinamika ekonomi, daya dukung lingkungan, segregasi pemukiman, persoalan keamanan, serta politisasi etnik dalam jabatan – jabatan birokrasi sipil dan jabatan – jabatan politis mempercepat terjadinya konflik antar etnik. Sedangkan faktor pemicunya lebih dilihat sejauh mana persoalan – persoalan kriminalitas dan provokasi dari pihak luar maupun *mass media* menjadi media ampuh penyulut kekerasan antar etnik.

Dari tiga contoh kasus kerusuhan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- (1) Konflik yang terjadi ialah konflik horizontal (kerusuhan Kupang dan Sambas) dan konflik vertikal-horizontal (kerusuhan Mataram);
- (2) Konflik yang terjadi disebabkan oleh kesenjangan ekonomi (kerusuhan Kupang) dan SARA (kerusuhan Mataram dan Sambas);
- (3) Faktor yang mempercepat terjadinya konflik ialah masalah keamanan yang tidak stabil, segregasi pemukiman antara penduduk asli dengan pendatang, pemberitaan media massa yang tidakimbang dan cenderung provokatif, kesenjangan sosial-ekonomi khususnya antara pendatang dan penduduk asli, politisasi etnik dalam perebutan kekuasaan dan birokrasi lokal, kondisi hubungan antar SARA yang rapuh di Indonesia menyebabkan longgarnya

hubungan sosial di tingkat nasional dan lokal, pola pemukiman yang cenderung atas dasar pengelompokan etnis, ras, dan golongan.

Berdasarkan beberapa contoh kasus diatas, baik yang berasal dari buku, artikel, dan internet, penelitian ini berbeda dengan beberapa contoh kasus tersebut. Jika ditinjau kembali, belum banyak penelitian yang mengkaji tentang konflik tapal batas wilayah terutama konflik tapal batas wilayah yang bersifat laten. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengetahui dan mengkaji tentang faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik tapal batas wilayah dan juga untuk mencari tahu apa dampak dari terjadinya konflik tapal batas wilayah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dideskripsikan berdasarkan hasil wawancara dengan informan, observasi dan dari data – data yang diperoleh di lapangan.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Konflik Kelompok di Indonesia

Konflik antar kelompok sering kali timbul karena adanya sejarah persaingan, prasangka dan rasa benci, baik itu sifatnya pribadi, politis, maupun ideologis yang melatar belakangnya. Bangunan konflik bisa diciptakan oleh kelompok luar maupun hubungan sosial yang tidak berjalan lurus. Konflik yang diciptakan oleh kelompok luar di masa – masa lalu di Indonesia dilakukan oleh pemerintah kolonial yang memiliki kepentingan untuk bisa membangun kekuatan

atas daerah jajahannya berusaha membangun pertentangan dan konflik di antara warga negara jajahannya agar tidak terbangun kesatuan wilayah.

Perpecahan di antara warga negara, etnik, dan agama akan memudahkan melakukan intervensi kekuasaan. Politik pecah belah (*divide et impera*) dijadikan sebagai alat untuk melakukan penguasaan terhadap wilayah – wilayah jajahan mereka. Konflik menjadi komoditas paling laku untuk dieksploitasi demi kepentingan tertentu. Beberapa konflik daerah di Indonesia disinyalir dilakukan oleh berbagai pihak yang ingin menutupi kesalahan – kesalahan tindakan politik di masa lalu.

Dengan adanya konflik tersebut diharapkan akan tercipta instabilitas kekuasaan dan pemerintahan sah. Indikatornya adalah konflik terjadi secara rapi dan simultan, dan para organisatornya dipastikan adalah yang memiliki dana yang kuat, jaringan yang terorganisasi, dan mengenal kelemahan – kelemahan hukum dan kemampuan jumlah aparat.¹⁵ Dengan demikian, konflik akan selalu melekat dalam setiap masyarakat. Masyarakat tidak pernah mungkin melepaskan diri dari konflik, karena konflik itu sendiri merupakan aspek penting dalam perubahan sosial.

Konflik menurut Dahrendorf sangat dipengaruhi oleh peran para aktor dalam organisasi yang didukung oleh ideologi dan kepentingan tertentu. Bahkan Talcott Parsons menyebutkan bahwa konflik terjadi karena benturan – benturan kepentingan (perebutan kekuasaan, status, dan materi) dari para aktor yang ada.

¹⁵ Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia Studi kasus: Kupang, Mataram, dan Sambas*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001, hal.14.

Asumsi yang melandasi konflik tersebut, karena setiap aktor yang ada dalam organisasi saling merebut tujuan tertentu, dan aktor – aktor itu memiliki cara untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor – aktor dari kelompok yang berbeda tersebut dihadapkan dengan sejumlah kondisi situasional tertentu yang bisa menimbulkan ketegangan sosial dan konflik yang terbuka.¹⁶

Konflik antar kelompok dalam masyarakat telah lama menjadi api dalam sekam dan proses penyelesaian konfliknya didasarkan pendekatan kekuasaan (*power-based approach*), tidak berdasarkan *community based approach* atau berdasarkan ketentuan hukum yang adil. Bangunan konflik yang ada dalam masyarakat memang sangat kondusif untuk diperluas dengan cara melakukan tindakan kekerasan, penggunaan kekerasan untuk memperluas konflik akan sangat memungkinkan untuk menumbuhkan sikap saling curiga, memperkuat barisan *in-group* (rasa kelompok dalam) dan *out-group* (rasa kelompok luar).¹⁷

Konflik merupakan faktor yang turut membangun perkembangan masyarakat. Konflik akan bisa membangun solidaritas kelompok dan hubungan antara warga Negara maupun antar kelompok. Konflik tidak bisa dihindari oleh setiap aktor, namun paling penting adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik agar ancaman (*thread*) bisa menjadi kesempatan (*opportunity*) dan bahaya timbulnya konflik yang terbuka secara meluas bisa dialokasi dengan membangun

¹⁶ George Ritzer (1981), diartikan oleh Ali Mandan, 1986 dalam *Sosiologi Berparadigma Ganda* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986).

¹⁷ Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia Studi kasus: Kupang, Mataram, dan Sambas*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001, hal. 33.

suatu model pencegahan dan penanggulangan secara dini (*early warning system model*).

Untuk mengantisipasi konflik, menurut Ralf Dahrendorf, perlu pengorganisasian terhadap kelompok – kelompok sosial yang ada akan mampu membangun sebuah mekanisme kontrol terhadap kecenderungan kelompok – kelompok sosial tersebut. Sebaliknya, jika pengorganisasian kelompok – kelompok sosial tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan terbuka kemungkinan – kemungkinan untuk melakukan gerakan – gerakan sosial yang tidak bisa dikontrol.

Pengorganisasian kelompok – kelompok sosial yang baik ini juga akan membangun masyarakat yang mengikuti aturan yang disepakati, karena kecenderungan konflik di berbagai daerah karena mereka menggunakan kekerasan atau penyerangan terhadap kelompok lain tanpa memperhatikan norma dan nilai sosial yang dijunjung tinggi bersama. Perilaku sosial mereka bukan dilandasi oleh mekanisme hubungan antar kelompok secara normatif, melainkan dibangun berdasarkan kebencian, prasangka dan stereotip negatif.

Bagi Dahrendorf, masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan konsensus¹⁸. Suatu individu atau kelompok tidak akan mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada konsensus. Demikian sebaliknya, konflik bisa juga mengantar seseorang atau kelompok menuju konsensus. Menurut Dahrendorf, berbagai posisi yang ada di masyarakat memiliki otoritas dan kekuasaan dengan

¹⁸ Bernard Raho, SVD. *Teori Sosiologi Modern*. 2007. Prestasi Pustaka Jakarta. Hal: 77

intensitas yang berbeda-beda¹⁹. Ada orang yang sangat berkuasa atau mempunyai otoritas tinggi dan ada orang lain yang mempunyai cuma sedikit kekuasaan atau otoritas yang sedikit. Hal itu, berarti bahwa dalam masyarakat ada beberapa posisi yang mendapat kekuasaan dan otoritas untuk menguasai orang lain sehingga kestabilan bisa dicapai.

Hubungan antara pemimpin dan komunikasi di antara kelompok – kelompok sosial menjadi sangat penting dalam mengatasi konflik horizontal antarkelompok sosial dan etnik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik pun harus didasarkan pengelolaan kelompok yang ada. Konsep pengelolaan konflik seperti ini harus memperhitungkan efektifitas interaksi sosial yang memungkinkan untuk membangun suatu pola hubungan yang terbuka dan akan mengurangi label – label negatif di antara kelompok yang berinteraksi. Fisher & Ury menyebutkan dengan konsep *getting to yes*.²⁰ Sebaliknya, ketertutupan interaksi di antara kelompok – kelompok sosial akan menimbulkan hubungan yang didasarkan saling curiga sebagai wujud nyata dari konflik laten yang sewaktu – waktu bisa meledak secara terbuka.

Jack Rothman²¹ mengatakan bahwa untuk mengatasi berbagai konflik yang ada dalam masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa tindakan yaitu:

¹⁹ Bernard Raho, SVD. *Teori Sosiologi Modern*. 2007. Prestasi Pustaka Jakarta. hal: 78

²⁰ Emil Salim, "Membangun Integrasi Bangsa", makalah dalam Simposium Kepedulian UI Terhadap Integrasi Bangsa Indonesia, 1999. Seperti dikutip dalam buku Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia Studi kasus: Kupang, Mataram, dan Sambas*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001, hal. 35

²¹ Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia Studi kasus: Kupang, Mataram, dan Sambas*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001, hal. 35

- (1) Tindakan koersif (paksaan), perlu ada pengaturan administratif, penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi;
- (2) Memberikan insentif seperti memberikan penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan keharmonisan;
- (3) Tindakan persuasif, terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik, dan ekonomi.
- (4) Tindakan normatif, yakni melakukan proses membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai.

Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Jack Rothman tidaklah cukup, untuk menyelesaikan konflik, pendekatan konflik bagi kedua pihak yang berkonflik perlu dipertimbangkan secara bersama – sama. Pihak – pihak yang berkonflik biasanya cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan yang bertentangan secara diametrikal. Hasil yang mungkin diperoleh adalah hasil kalah-menang (satu pihak menang, pihak lain kalah) atau kompromi (mereka membagi perbedaan – perbedaan yang ada).

Tetapi ada banyak hasil yang sama apabila konflik berakhir dengan kekerasan, yakni keduanya sama – sama kalah. Jika tidak ada yang mampu memaksakan sebuah hasil atau bersedia untuk berkompromi, pihak yang bertikai dapat memaksakan biaya yang sangat besar pada masing – masing pihak dimana pada akhirnya semua pihak berakhir dalam keadaan yang sama – sama buruk dibandingkan dengan mereka menggunakan strategi yang lain. Dalam analisa penyelesaian konflik dapat ditemukan bahwa hal ini merupakan hasil yang sering muncul ketimbang yang diharapkan. Pada saat hal ini menjadi jelas bagi pihak –

pihak yang bertikai, ada dasar yang kuat didasarkan pada kepentingan sendiri untuk mencapai hal lain, seperti umpamanya berkompromi atau mencari penyelesaian dengan hasil yang memuaskan seperti apa yang mereka harapkan (menang-menang).

Secara tradisional, tugas penyelesaian konflik adalah membantu pihak – pihak – pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi *zero-sum*²² (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain) agar melihat konflik sebagai keadaan *non-zero-sum* (di mana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil atau keduanya dapat sama – sama tidak memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak – pihak yang bertikai berpindah kearah hasil positif.

Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Karena konflik memiliki fungsi positif (George Simmel, 1918; Lewis Coser, 1957) apabila konflik dikelola dengan baik akan menjadikan konflik sebagai suatu hal yang konstruktif (membangun) sehingga dampak – dampak negatif akibat terjadinya konflik bisa dihindari atau diminimalisir, konflik menjadi dinamika sejarah manusia (Karl Marx, 1880/2003; Ibnu Khaldun, 1332-1406) sepanjang sejarah peradaban manusia tidak pernah lepas dari konflik. Mulai dari zaman Nabi Adam hingga sekarang konflik menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dan terakhir, konflik adalah bagian dari proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Maslow, 1954; Max Neef, 1987; John Burton, 1990; Marshal Rosberg, 2003)²³

²² Hugh, Miall (1999). Diterjemahkan oleh Tri Budhi Sastrio, *Resolusi damai konflik kontemporer: menyelesaikan, mencegah, mengelola, dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 10

²³ Sosiologi Konflik & Isu – Isu Konflik Kontemporer, Novri Susan, M.A, hal 4

dalam proses memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia biasanya cenderung akan melakukan apa saja agar kebutuhan hidupnya terpenuhi, walaupun harus mengorbankan dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia seringkali berkonflik dengan manusia lainnya.

Manusia adalah makhluk konflikstis (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang disusun Poerwadarminta (1976), konflik berarti pertentangan atau percek-cokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak yang berseberangan. Francis menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (Francis, 2006:7)²⁴. Sehingga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.

Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang (*interpersonal konflik*), konflik antar-kelompok (*intergroup konflik*), konflik antara kelompok dengan Negara (*vertical konflik*), dan konflik antar-negara (*interstate konflik*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya masing – masing. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendominasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Konflik yang berlarut – larut dalam masyarakat tentu saja tidak hanya menyita energi yang tidak perlu,

²⁴ *Ibid.* hal. 4

melainkan juga bisa melemahkan daya tahan masyarakat itu sendiri. Lebih jauh lagi, konflik tersebut bisa saja bermuara pada disintegrasi sosial, yang pada gilirannya bisa mengancam integrasi nasional.

1.5.2. Pemetaan Konflik

Pemetaan konflik memberi gambaran pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Menurut Fisher (2001 : 22) seperti dikutip oleh Novri Susan (2008 : 88), pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak – pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak – pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman pandangan masing – masing.

Miall membuat panduan pemetaan konflik untuk melihat pihak – pihak yang bertikai dan persoalannya (Miall, Romsbotham dan Wood, 2003) :

1. Siapa yang menjadi inti pihak yang bertikai? Apa subkelompok internal mereka dan pada apa mereka tergantung?
2. Apa yang menjadi persoalan konflik? Apa mungkin membedakan antara posisi, kepentingan (kepentingan materi, nilai, hubungan) dan kebutuhan?
3. Apa hubungan antara pihak – pihak yang bertikai? Apakah ada ketidaksimetrisan kualitatif dan kuantitatif?
4. Apa persepsi penyebab dan sifat konflik di antara pihak – pihak yang bertikai?

5. Apa perilaku akhir – akhir ini pihak – pihak yang bertikai (apakah konflik dalam fase eskalasi atau deskalasi)?
6. Siapa pemimpin pihak – pihak yang bertikai? Pada tingkat elite dan individual, apa tujuan, kebijakan, kepentingan, kekuatan dan kelemahan relatif mereka?

Satu model lain pemetaan konflik multidisipliner yang dikembangkan oleh sosiolog dari United Nations-University for Peace, Amr Abdalla (2002), yaitu model SIPABIO. SIPABIO adalah :

1. *Source* (sumber konflik). Konflik disebabkan oleh sumber – sumber yang berbeda sehingga melahirkan tipe – tipe konflik berbeda.
2. *Issues* (isu – isu). Isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan – tujuan yang tidak sejalan di antara pihak bertikai. Isu ini dikembangkan oleh semua pihak bertikai dan pihak lain yang tidak teridentifikasi tentang sumber – sumber konflik.
3. *Parties* (pihak). Pihak yang berkonflik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam konflik, baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan, maupun pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan, dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak tersier ini yang sering dijadikan sebagai pihak netral untuk mengintervensi konflik.
4. *Attitudes/feelings* (sikap). Sikap adalah perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Sikap bisa muncul dalam bentuk yang positif dan negatif bagi konflik.
5. *Behaviour* (perilaku/tindakan). Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak yang berkonflik, baik muncul dalam bentuk *coercive action* dan *noncoercive action*.
6. *Intervention* (campur tangan pihak lain). Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian.
7. *Outcome* (hasil akhir). Outcome adalah dampak dari berbagai tindakan pihak – pihak berkonflik dalam bentuk situasi.

Dari dua tipe pemetaan konflik tersebut, teknik pemetaan konflik SIPABIO mungkin lebih mudah untuk dikembangkan sebagai analisis konflik nantinya.

1.5.3. Jenis – jenis dan Tipe Konflik

Kita memiliki dua jenis konflik, yang pertama ialah jenis konflik vertikal atau “konflik atas”. Yang dimaksud dengan konflik vertikal ialah konflik elite (pemerintah, kelompok bisnis, atau aparat militer) dan Massa (rakyat). Hal yang menonjol dalam konflik ini ialah cenderung digunakannya instrument kekerasan negara, sehingga timbul korban di kalangan massa (rakyat). Sedangkan jenis konflik yang kedua adalah jenis konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) sendiri. Dalam kurun beberapa tahun terakhir (sejak pertengahan 90-an), diketahui setidaknya – tidaknya ada dua jenis konflik horizontal yang tergolong besar pengaruhnya: (1) konflik antar agama, khususnya antara kelompok agama nasrani (Protestan dan Katolik). Konflik jenis ini terjadi di beberapa daerah seperti Ambon, Maluku, Jakarta dan daerah lainnya²⁵; (2) konflik antar suku, khususnya antara suku Jawa dan suku – suku lain diluar Pulau Jawa. Selain itu, muncul pula kasus konflik antara suku Madura dengan suku Melayu di Kalimantan Barat²⁶.

Selain jenis konflik, juga perlu mengetahui istilah tipe konflik yang akan menggambarkan persoalan sikap, perilaku, dan situasi yang ada. Tipe – tipe konflik terdiri dari tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan (Fisher, 2001). *Tanpa Konflik* menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan – hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. Pada tipe konflik ini, bukan berarti tidak ada konflik di dalam masyarakat, akan

²⁵ Riza Sihbudi. 2001. *Bara Dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah Dan Solusi Atas Konflik-Konflik Lokal Di Aceh, Maluku, Papua, Dan Riau*. Bandung: Mizan Media Utama.

²⁶ Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia Studi kasus: Kupang, Mataram, dan Sambas*, Jakarta: PT. Grasindo.

tetapi masyarakat dirasa telah mampu untuk mencegah dan manajemen konflik, sehingga konflik dapat dicegah kearah konflik yang berujung pada kekerasan, dan juga adanya sifat budaya masyarakat yang memungkinkan untuk menjauhi permusuhan dan kekerasan²⁷.

Konflik Laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu di angkat ke permukaan agar bisa ditangani. Pada tipe konflik ini, kehidupan masyarakat yang tampak stabil dan harmonis belum merupakan jaminan bahwa di dalam masyarakat tidak terdapat permusuhan dan pertentangan²⁸. Kenyataan ini dapat dilihat pada masyarakat Indonesia masa Orba dahulu. Pada masyarakat Orba kelihatan harmonis, damai, rendahnya tingkat pertentangan di antara anggota – anggota masyarakat baik dalam dimensi ekonomi, etnis, maupun agama. Akan tetapi, dibalik stabilitas, keharmonisan, dan perdamaian tersebut ternyata terdapat konflik laten yang begitu besar. Hal tersebut dapat dilihat pada saat rejim atau kekuasaan Orba runtuh dan kemudian timbulnya berbagai gejolak atau konflik laten pada masyarakat dalam dimensi etnis, keagamaan, dan separatism.

Konflik Terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai dampaknya²⁹. Sebagai contoh kasus konflik di Ambon pada awal 1999, di Kalimantan Barat 1999, dan juga di Poso Sulawesi. Pada situasi konflik terbuka muncul dampak yang tidak terhitung jumlahnya baik jiwa maupun materiil.

Konflik di Permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka)³⁰. Sebagai contohnya adalah tawuran atau perkelahian antar SMA. Konflik kekerasan yang muncul seringkali

²⁷ Novri Susan. 2008. *Sosiologi Konflik dan Isu – isu Konflik Kontemporer*. Hal : 92-93

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

hanya disebabkan oleh kesalahpahaman komunikasi. Seperti saling ejek antar supporter, senggolan di acara hiburan, atau saling lirik ketika berpapasan di jalan bisa menjadi akar permasalahan yang berkembang menjadi tawuran massal.

Dari berbagai jenis dan tipe konflik ini dapat disimpulkan bahwa jenis konflik tapal batas wilayah antara Desa Keringing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir adalah jenis *Konflik Horizontal*, dimana telah terjadi konflik antar massa sendiri. Sedangkan tipe konfliknya adalah tipe *Konflik Laten*, karena pada masyarakat kedua desa yang bertikai bila dilihat dari “luar” tampak harmonis dan baik – baik saja seperti tidak ada gejolak atau pertentangan dari kedua desa tersebut, padahal pada kenyataannya sedang terjadi konflik dalam masyarakat tersebut.

1.5.4. Tanah Sebagai Sumber Produksi

Menurut Marx, perkembangan masyarakat adalah hasil interaksi yang produktif dan berulang kali antara alam dan manusia. Manusia mulai membedakan dirinya dari binatang, segera setelah ia mulai *memproduksi* peralatan kehidupannya. Produksi dan reproduksi kehidupan, kedua – duanya merupakan urgensi yang didiktekan oleh kebutuhan – kebutuhan biologis dari organisme manusia dan yang lebih penting merupakan sumber kreatif dari kebutuhan – kebutuhan dan kemampuan – kemampuan. Dengan demikian, kegiatan produksi itu baik dalam pengertian sejarah maupun analitis merupakan akar dari masyarakat.

Produksi adalah tindakan sejarah pertama dan produksi kehidupan materiil adalah syarat dasar dari semua sejarah, yang seperti ribuan tahun yang lalu harus dipenuhi tiap jam dan tiap hari guna menopang kehidupan manusia. tiap macam sistem produksi membawa serta suatu perangkat tertentu dari hubungan sosial yang ada antara individu – individu yang terlibat di dalam proses yang produktif. Di dalam setiap bentuk masyarakat terdapat sejumlah tenaga – tenaga produktif,

suatu hubungan yang tercipta secara historis antara individu – individu dengan alam dan sebaliknya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Konflik perbatasan antara Desa Kerinjing dan Desa Sukaraja Baru secara tidak langsung menyangkut konflik perebutan sumber produksi karena konflik yang terjadi ialah konflik memperebutkan tanah atau lahan pertanian sebagai sumber produksi, dimana luas lahan yang diperebutkan ialah seluas $\pm 1,4 \text{ km}^2$. Konflik yang berlangsung sejak lama tersebut tentu saja telah diwariskan turun temurun sehingga akan terjadi suatu kesimpang siuran sejarah apabila tidak segera diselesaikan.

Tanah sebagai sumber produksi tentu saja berperan cukup penting bagi masyarakat kedua desa karena sebagian besar masyarakat kedua desa bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga ketersediaan lahan sangat penting bagi masyarakat kedua desa karena dengan ketersediaan lahan yang besar maka tentu saja produksi mereka juga akan dan juga dengan produksi yang besar akan menambah penghasilan mereka atau dengan kata lain akan berdampak pada perekonomian mereka.

1.5.5 Konflik Dialektik Dahrendorf

Dahrendorf menganggap masyarakat memiliki sisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama, atau bisa dikatakan memiliki sisi konflik dan konsensus.³¹ Suatu individu atau masyarakat tidak akan mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada konsensus, dan juga sebaliknya. Konflik bisa mengantar suatu individu atau masyarakat menuju konsensus. Proses konflik sosial ini

³¹ Bernard Raho, SVD. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prestasi Pustaka. Hal: 77

merupakan kunci bagi struktur sosial.³² Oleh karena itu, teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Dalam teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan dalam teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu.³³

Menurut Dahrendorf, setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan dan melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial, dan juga melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan.³⁴ Konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang di atas, dan konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.³⁵ Hal itu berarti bahwa dalam masyarakat ada beberapa posisi yang mendapat kekuasaan dan otoritas untuk menguasai orang lain sehingga kestabilan bisa tercapai.

Otoritas tidak terletak di dalam individu, tetapi di dalam posisi. Menurut Dahrendorf (1959:165) “ sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan”. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain.

³² Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. Hal: 130

³³ George Ritzer dan Douglas J.Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta.Prenada Media.Hal:153

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*



Dahrendorf menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari sejumlah unit yang ia sebut *asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif*. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; karena itu hanya ada dua kelompok konflik yang dapat terbentuk di dalam setiap asosiasi. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu “yang arah dan substansinya saling bertentangan”. *Kepentingan* yang dimaksud oleh Dahrendorf mungkin bersifat *manifest* (disadari) atau *Laten* (kepentingan potensial) atau tingkah laku potensil yang telah ditentukan bagi seseorang karena dia menduduki peranan tertentu tetapi masih belum disadari.³⁶

Tiga tipe utama kelompok menurut Dahrendorf. Pertama adalah kelompok semu (*quasi group*) atau “sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama” (Dahrendorf, 1959:180). Kelompok semu ini adalah calon anggota tipe kedua, yakni *kelompok kepentingan*. Kedua kelompok ini digambarkan oleh Dahrendorf seperti berikut:

Mode perilaku yang sama adalah karakteristik dari *kelompok kepentingan* yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat; dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan (Dahrendorf, 1959:180).

Dari berbagai jenis kelompok kepentingan itulah muncul *kelompok konflik* atau kelompok yang terlibat dalam kelompok aktual.

³⁶ Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. Hal:135

Menurut Dahrendorf, konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Di bawah kondisi yang ideal tak ada lagi variabel lain yang diperlukan. Tetapi, karena kondisi tak pernah ideal, maka banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam konflik sosial. Seperti personil yang cukup (kondisi teknis), kondisi politik, dan kondisi sosial.³⁷

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis Coser yang memusatkan perhatian pada fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial; konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan.³⁸ Singkatnya Dahrendorf menyatakan bahwa setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai tindakan kekerasan, akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba. Apa pun ciri konflik, sosiologi harus membiasakan diri dengan hubungan antara konflik dan perubahan maupun dengan hubungan antara konflik dan *status quo*.³⁹

1.5.6. Dampak Terjadinya Konflik Tapal Batas

Seperti halnya dengan konflik lainnya, konflik tapal batas juga memiliki dampak, baik dampak manifest (nyata) maupun dampak laten (tersembunyi).

³⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prenada Media. Hal:157

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

Konflik tapal batas yang terjadi antara Desa Kerinjing dan Desa Sukaraja Baru di Kabupaten Ogan Ilir merupakan konflik laten yang melibatkan kelompok-kelompok yakni kelompok Desa Kerinjing yang terdiri dari warga masyarakat Desa Kerinjing beserta Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, dan kelompok Desa Sukaraja Baru yang terdiri dari warga masyarakat Desa Sukaraja Baru beserta Kepala Desa dan perangkat desa lainnya.

Berlarutnya penyelesaian konflik yang melibatkan dua kelompok yang bertikai tentu saja menyebabkan berbagai dampak dan persoalan, seperti adanya jarak sosial, chauvinisme, ekonomi dan masalah komunikasi. Adanya jarak sosial maupun chauvinisme ialah akibat adanya salah satu kelompok ataupun kedua kelompok yang membandingkan kelebihan kelompoknya masing-masing. Baik itu status sosial, status ekonomi, kecantikan, karakter kepribadian dan sebagainya. Dan akibat atau dampak dari perbandingan semacam ini adalah adanya penilaian sesuatu lebih baik atau lebih buruk dari kelompok atau individu lain, atau bisa dikatakan penilaian semacam ini disebut prasangka sosial.

Seperti yang di ungkapkan oleh Sherif and Sherif, bahwa :

“Prasangka sosial adalah suatu sikap negatif para anggota kelompok, berasal dari norma mereka yang pasti, kepada kelompok lain beserta para anggotanya.” (Sherif and Sherif)

Lebih lanjut Sherif menjelaskan bahwa prasangka disini dimaksudkan sebagai suatu sikap yang tidak simpatik terhadap kelompok luar (out group). Hal ini ditunjukkan dalam jarak sosial (Social Distance) yang mana merupakan suatu posisi yang diberikan oleh para anggota kelompok yang berprasangka ini kepada

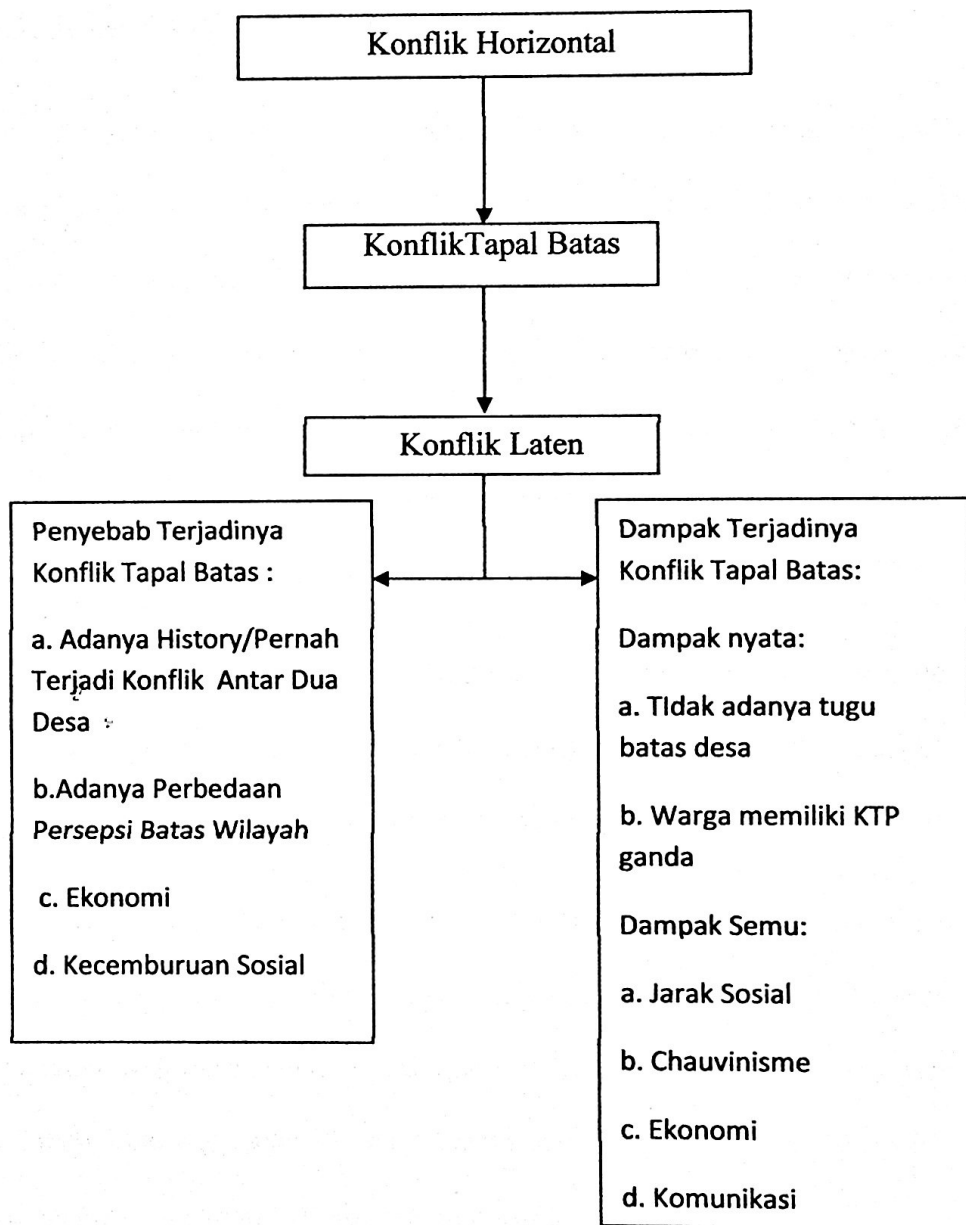
kelompok lain dalam persoalan simpati. Sehingga bisa saja prasangka ini akan berkembang menjadi rasa atau sikap bermusuhan yang mendalam.

Dampak lain dari konflik tapal batas ini bisa meliputi dampak ekonomi. Seperti telah dibahas sebelumnya dimana tanah sebagai sumber produksi mayoritas masyarakat kedua desa yang berkonflik tentu saja memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, dimana luas tanah yang disengketakan cukup luas. Sehingga dikhawatirkan akan cukup berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat kedua desa.

Tidak hanya masalah ekonomi yang dikhawatirkan, masalah komunikasi pun dirasa cukup rentan terjadi permasalahan. Lamanya konflik yang terjadi antara kedua desa bisa saja menyebabkan masyarakat kedua desa menjadi enggan untuk saling berkomunikasi dikarenakan takut di “cap” penghianat oleh kelompoknya bila mereka terlalu akrab dengan kelompok dari luar kelompoknya. Sehingga mereka akan dijauhi oleh kelompok intern-nya apabila mereka terlalu akrab dengan kelompok dari luar kelompoknya.

Bagan 1.1

Konflik Tapal Batas Wilayah Desa Kerinjing dan Desa Sukaraja Baru



Sumber: Olahan Hasil Penelitian

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Sifat dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini maka jenis metode yang digunakan adalah kualitatif. Peneliti kualitatif bermaksud memberi makna atas fenomena secara holistik (menyeluruh) dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi. Oleh karena itu, temuan – temuan dalam studi kualitatif sangat dipengaruhi oleh nilai dan persepsi peneliti (*research's values and perception*). Orientasi kerja penelitian semacam ini melegitimasi pemikiran bahwa pendekatan penelitian adalah subjektif.⁴⁰

Sedangkan penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁴¹

Fenomena dalam penelitian ini adalah mengenai konflik tapal batas wilayah Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

⁴⁰ Prof. Dr. Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Cetakan I. Bandung, 2002. Hal 35

⁴¹ Suharsami Arikunto. *Produser Penelitian*. Edisi revisi V. Jakarta. PT Rineka Cipta. 1997. hal. 254.

1.6.2. Definisi Konsep

- ❖ **Konflik** : situasi (keadaan) di mana dua atau lebih pihak – pihak yang memperjuangkan tujuan mereka masing – masing yang tidak dapat dipersatukan dan dimana tiap – tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai tujuannya masing – masing (Ronny Hanitijo 1984 : 22 seperti dikutip oleh Husni 2007 : 2).
- ❖ **Tapal Batas** : perbatasan (negara, daerah) atau garis pembatas dan atau pemisah (antara unit administratif atau antara unit regional geografis yang berbeda, baik fisik maupun budaya)⁴²
- ❖ **Desa** : suatu masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

1.6.3. Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah kelompok yakni warga masyarakat Desa Keringing Kecamatan Tanjung Raja dan warga masyarakat Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

⁴² <http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=tapal%20batas>

1.6.4. Informan

Dalam penelitian kualitatif peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, penentuan informan dilakukan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*). Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik. Yang kedua adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul.⁴³

Subjek dan informan dalam penelitian ini dimaksud adalah informan penelitian yang berfungsi untuk menjaring sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan penelitian.⁴⁴ Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan Informan dalam penelitian ini digunakan dengan cara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian.⁴⁵

Beberapa kriteria dalam menentukan informan awal dalam penelitian ini adalah :

- Masyarakat Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang meliputi :
 - Kepala Desa Kerinjing

⁴³ Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 1998. hal : 165

⁴⁴ Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Press. 2003. hal. 206

⁴⁵ *Ibid* hal. 53

- Perangkat Desa Kerinjing
- Warga Dusun I Desa Kerinjing
- Para Seseputuh atau Tetua adat Desa Kerinjing
- Warga Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir yang meliputi :
 - Kepala Desa Sukaraja Baru
 - Perangkat Desa Sukaraja Baru
 - Warga Dusun IV Desa Sukaraja Baru
 - Para Seseputuh atau Tetua adat Desa Sukaraja Baru

1.6.5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir karena di daerah tersebut telah terjadi konflik perebutan tapal batas wilayah desa yang belum terselesaikan dan belum diketahui apa sebab dan dampak dari terjadinya konflik perebutan tapal batas wilayah desa.

1.6.6. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.⁴⁶ Menurut Lofland dan Lofland (1984) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti

⁴⁶ Suharsami Arikunto. *Produser Penelitian. Edisi revisi V*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 1997. hal.107

dokumentasi dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.⁴⁷

Data dibedakan menjadi 2 yaitu :

*** Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara langsung, observasi, dan alat lainnya. Data primer tersebut selain didapat dari informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan warga masyarakat Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

*** Data Sekunder**

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber yang sifatnya secara tidak langsung mampu melengkapi data primer. Sumber data sekunder ini di dapat melalui data tertulis seperti majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi⁴⁸. Dalam penelitian ini peneliti akan melengkapi data dengan artikel tentang konflik tapal batas, contoh kasus konflik tapal batas serta penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan konflik tapal batas ataupun konflik horizontal lainnya.

⁴⁷ Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 1998. hal. 112

⁴⁸ *Ibid.* hal. 113

1.6.7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:⁴⁹

a. Persiapan memasuki kancah penelitian (getting in)

Awalnya, peneliti berusaha untuk mengadakan observasi secara langsung terhadap berbagai realitas yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh fenomena di lapangan. Peneliti harus berusaha untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang fenomena yang menjadi obyek penelitian. Agar proses pengumpulan data dan informasi berjalan sesuai rencana, peneliti harus menyiapkan segala sesuatu diperlukan, baik kelengkapan bersifat administratif maupun semua masalah dan persoalan berhubungan dengan setting dan subyek penelitian untuk mencari relasi awal. Peneliti harus menempuh pendekatan informal dan formal, serta juga harus mampu menjalin hubungan yang akrab dengan informan.

Untuk itu agar diperoleh suatu data yang valid, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dari sumber data tersebut dengan berlandaskan asas yang etis dan simpatik sehingga bisa mengurangi jarak antara peneliti dengan para informan. Peneliti berperilaku dengan sopan, baik dalam kata bahasa dan bertindak. Pada tahap ini yang diutamakan adalah bagaimana peneliti dapat diterima dengan baik pada waktu memasuki setting arena.

⁴⁹ Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Press. 2003. hal. 102

b. Ketika berada di lokasi penelitian (getting along)

Di saat peneliti memasuki lokasi penelitian dan berhasil menjalin hubungan dengan informan, maka hubungan yang terjalin harus tetap dipertahankan. Kedudukan subyek harus dihormati dan diberikan kebebasan untuk mengemukakan semua persoalan, data serta informasi yang diketahui, peneliti tidak boleh mengarahkan dan melakukan intervensi terhadap pandangan atau pendapat subyek penelitian.

Kemudian secara bertahap peneliti mulai memasuki tahap penggalian fenomena penelitian. Peneliti baru mulai mengadakan wawancara bebas (pertama kali melakukan perbincangan secara informal) mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam setiap wawancara sedapat mungkin harus dihindari wawancara yang bersifat formal, sebaiknya harus diciptakan suasana informal, alamiah dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada informan untuk mengungkapkan secara bebas pengalaman-pengalamannya.

c. Keluar dari penelitian (getting out)

Pada tahap ini proses pengumpulan data dihentikan setelah dianggap "jenuh", yaitu setelah tidak ada jawaban baru lagi dari lapangan. Artinya, peneliti selalu memperoleh informasi atau jawaban yang sama atau sejenis dari informan-informan baru. Situasi ini ditandai dengan data yang terkumpul selalu menunjukkan hal yang sama dari berbagai situasi dan sumber yang berbeda.

1.6.8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari lapangan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yang merupakan suatu gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, menggambarkan, memaparkan serta menganalisis sebab – sebab dan dampak terjadinya konflik perebutan tapal batas wilayah Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Habermas (1992) melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian dan kesimpulan.⁵⁰

1. Tahap Reduksi Data

Peneliti pada tahap ini memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul, yaitu data hasil observasi mengenai tempat – tempat yang sering terjadi konflik antara warga masyarakat Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan warga masyarakat Desa Sukaraja Baru Kecamatan Sukaraja Selatan Kabupaten Ogan Ilir contohnya yaitu wilayah yang diperebutkan oleh kedua desa, serta data-data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diambil peneliti. Dan hasil data wawancara mendalam kepada informan yang mengetahui terjadinya konflik perebutan tapal batas wilayah tersebut, serta hasil dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Press. 2003. hal 229

Data di lapangan tersebut selanjutnya dipilih dalam arti kata menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian, data yang cocok dengan maksud penelitian yang akan peneliti ambil, bagaimana proses terjadinya konflik perebutan tapal batas wilayah Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir. Data yang dipilih sesuai dengan pertanyaan penelitian akan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan kemudian peneliti melakukan abstraksi data menjadi uraian singkat.

2. Tahap Penyajian Data

Peneliti pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu, artinya data mengenai konflik perebutan tapal batas peneliti sajikan dalam bentuk cerita yang sesuai dengan tema-tema masalah penelitian. Uraian-uraian singkat yang diperoleh dari data tersebut disajikan ke dalam sebuah tulisan cerita dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah ada.

3. Tahap Kesimpulan

Penelitian pada tahap ini selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data mengenai konflik tapal batas wilayah Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan. Data yang menunjang fokus penelitian akan disesuaikan kembali dengan data-data yang didapat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Abdalla, Amr. 2002. *Say Peace: Conflict Resolution Training Manual for Muslim Communities*. Virginia USA: The Graduate School of Islamic and Social Sciences.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Press.
- Coleman dan Rosberg seperti dikutip Nazaruddin Sjamsuddin, “Dimensi Politik dari Integrasi Nasional: Tinjauan Teoritis”, dalam Saifuddin Zuhri dan A.B. Tangdililing, ed., *Integrasi Nasional: Teori, Masalah, dan Strategi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996).
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Dhakidae, Daniel. 2001. *Aceh Jakarta Papua : Akar Permasalahan dan Proses Penyelesaian Konflik*. Jakarta: YAPPIKA.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.
- George Ritzer (1981), diartikan oleh Ali Mandan, 1986 dalam *Sosiologi Berparadigma Ganda* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986).
- Hasrullah. 2009. *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hugh, Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: menyelesaikan, mencegah, melola, dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras*. Terjemahan Tri Budhi Sastrio. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jonson, Paul Doyle. 1991. *Teori Sosiologi Modern dan Klasik*, terjemahan Robert MZ Lawang, Jakarta: Gramedia.

- Lexi J.Moleong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Margaret M. Poloma. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Terjemahan Tim Penerjemah YASOGAMA, Jakarta: CV Rajawali.
- Raho, Bernard, SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Reid, Anthony. 2005. *Asal Usul Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19/ Anthony Reid; penerjemah: Masri Maris*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia Studi kasus: Kupang, Mataram, dan Sambas*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2008. *Social Mapping (Metode Pemetaan Sosial)*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Sihbudi, Riza. 2001. *Bara Dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah Dan Solusi Atas Konflik-Konflik Lokal Di Aceh, Maluku, Papua, Dan Riau*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Suharsami Arikunto. 1997. *Produser Penelitian. Edisi revisi V*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Susan, Novri. 2008. *Sosiologi Konflik dan Isu – isu Konflik Kontemporer*.
- Tahir, M. Irwan, & Wastiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.
- The Peace Building Toolkit *Learning from good practice: The Experience of Indonesian Peacebuilding Practicioners*. 2003. Jakarta: CRS.

B. Peraturan – Peraturan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Sumber Lain

Bangka Pos edisi: 10/10/2009.

Sumatera Ekspres edisi: 28/1/2010.

Sumatera Ekspres edisi: 23/2/2010.

Sumsel Post edisi: 29/12/2010.

<http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=tapal%20batas>.

<http://isidoruslilijawa.blogspot.com/2008/04/situasi-batas-di-tapal-batas.html>.

<http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/06/06/19741/Konflik-Tapal-Batas-Jambi-Sumsel-Belum-Tuntas>